

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Dinas kelautan dan perikanan DIY adalah suatu institusi yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengawasi dan mengatur pelaksanaan terkait bidang kelautan dan perikanan di Provinsi daerah istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015, Tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

B. VISI DAN MISI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan

“Terwujudnya kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan”

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kelautan dan perikanan

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari unsur masyarakat inti dan pendukung. Masyarakat inti terdiri dari pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar produk perikanan. Sedangkan masyarakat pendukung terdiri dari institusi perguruan tinggi, litbang, kelompok kerja, LSM dan pemerhati

yang melakukan kegiatan berhubungan dengan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.

b. Berdaya saing

Maju, tangguh, kreatif, inovatif, mutu/ kualitas, terampil, profesional, Dalam rangka membangun daya saing usaha masyarakat, Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada kebutuhan pasar. Hasil dari transformasi pemanfaatan sumberdaya lokal menjadi produk berupa barang/jasa kelautan dan perikanan harus berorientasi pada pasar lokal maupun regional secara optimal dan berkelanjutan melalui kerjasama dunia usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

c. Berkelanjutan

Menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan, konservasi, rehabilitasi ekosistem, pengawasan, berwawasan lingkungan.

2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Meningkatkan Kemnadirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

b. Meningkatkan dan Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan Perikanan.

C. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya.
2. Mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

b. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran
 - a. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
 - b. Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap
 - c. Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Pesisir

- d. Meningkatkan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Tawar
 - e. Kelompok Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Mandiri Dan Sejahtera
2. Misi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan sasaran :
- a. Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
3. Misi meningkatkan dan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan perikanan dengan sasaran :
- a. Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat
 - b. Kelompok masyarakat pengawas perikanan meningkat
 - c. Berkurangnya tingkat pelanggaran

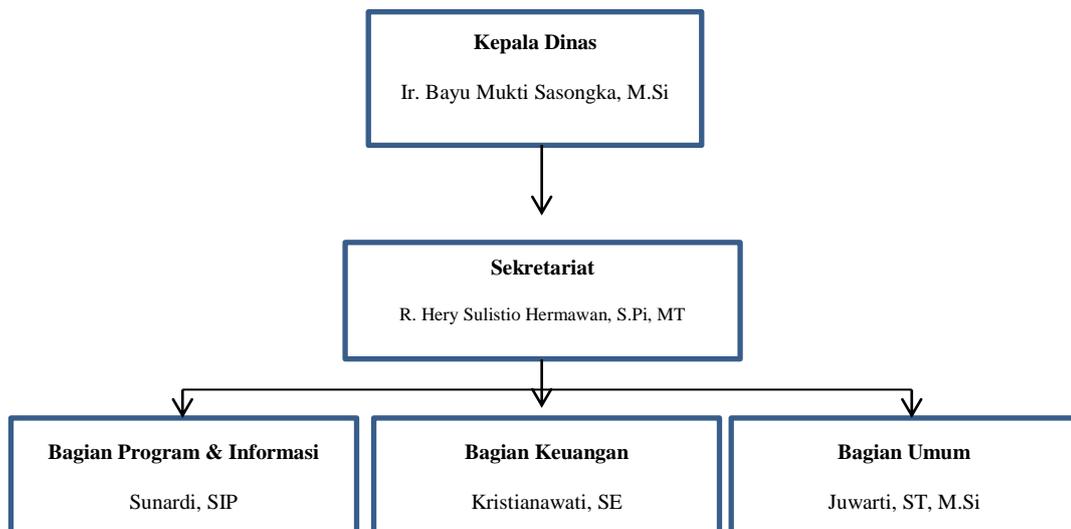
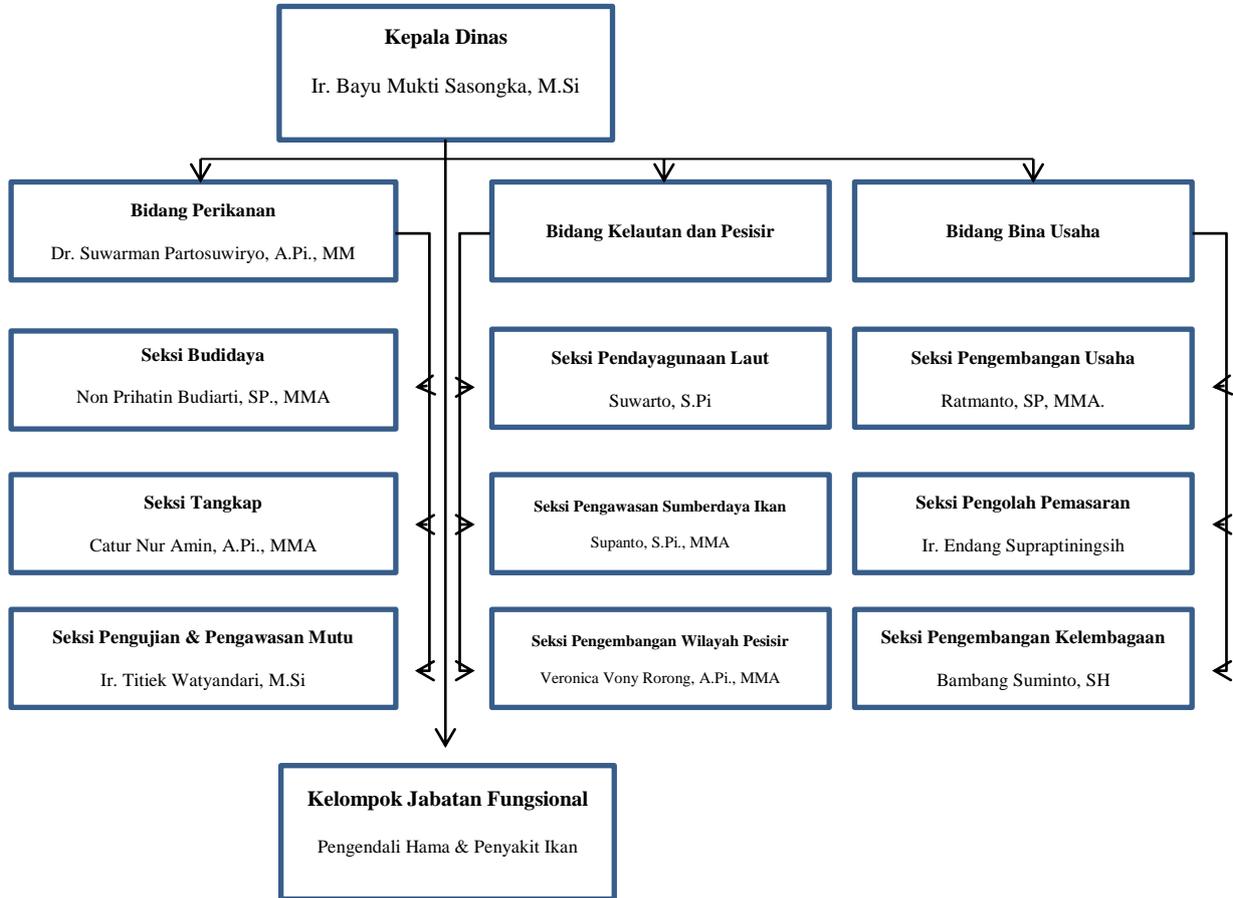
D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Adapun unsur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY terdiri dari :

- 1. Pimpinan : Kepala Dinas
- 2. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari sub bagian yang terdiri dari :

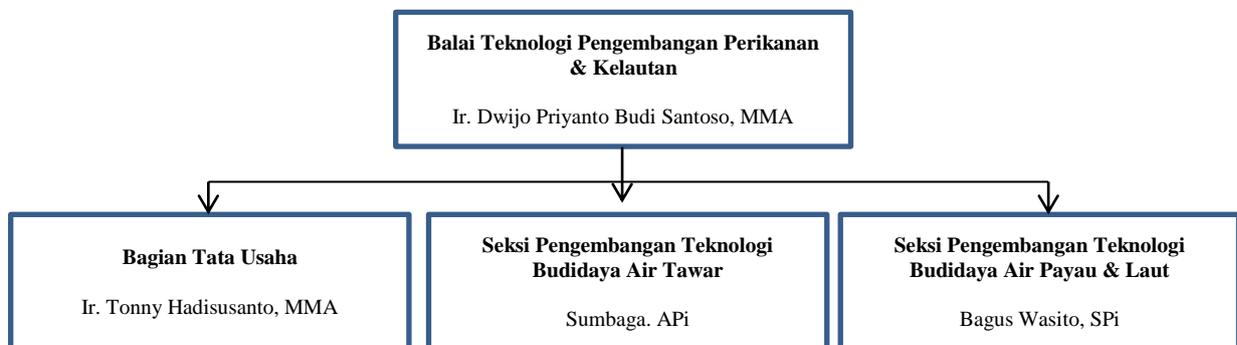
- a. Sub bagian program dan informasi.
 - b. Sub bagian Keuangan.
 - c. Sub bagian Umum.
3. Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi :
- a. Bidang perikanan
 - 1. Seksi budidaya.
 - 2. Seksi tangkap.
 - 3. Seksi pengujian dan pengawasan mutu.
 - b. Bidang kelautan dan pesisir
 - 1. Seksi pendayagunaan laut.
 - 2. Seksi pengawasan sumber daya ikan.
 - 3. Seksi pengembangan wilayah pesisir.
 - c. Bidang bina usaha
 - 1. Seksi pengembangan usaha.
 - 2. Seksi pengolah pemasaran.
 - 3. Seksi pengembangan kelembagaan.

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



- d. Unit pelaksana teknis BPTPB : yang terdiri dari sub bagian dan seksi-seksi yang terdiri dari :
1. Sub bagian tata usaha.
 2. Seksi pengembangan teknologi budidaya air tawar.
 3. Seksi pengembangan teknologi budidaya air payau dan air laut.
- e. Unit pelaksana teknis PPP Sadeng
1. Sub bagian tata usaha.
 2. Seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaraan.
 3. Seksi tata kelola dan pelayanan usaha.

Tabel 2. 2 Struktur Unit pelaksana teknis BPTPB



Tabel 2. 3 Struktur Unit pelaksana teknis PPP Sadeng



Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015, Tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai berbagai fungsi:

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan.
2. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
3. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, wilayah pesisir.
4. pengujian dan pengawasan mutu perikanan.

5. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota.
6. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya.
7. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/ kota.
8. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan.
9. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dalam rangka efektifitas dan efesiensi peran Dinas, struktur organisasi yang ada pada eselon tiga terdiri dari: Sekretariat, Bidang Perikanan, Bidang Kelautan dan Pesisir, Bidang Bina Usaha, UPT Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng serta kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, krtatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja dinas. Sekretariat terdiri dari : Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Program dan Informasi. Sekretariat

berfungsi sebagai berikut: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja.
2. Penyusunan program Dinas.
3. Fasilitasi perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang kelautan dan perikanan.
4. Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas.
5. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas.
6. Pengelolaan keuangan Dinas.
7. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi .
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
9. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program perikanan budidaya , perikanan tangkap serta pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan. Bidang Perikanan terdiri dari : Seksi Teknis

Budidaya, Seksi Teknis Tangkap, dan Seksi Pengujian – Pengawasan Mutu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan.
3. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
4. Penyelenggaraan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
5. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
6. Pengembangan teknologi perikanan tangkap.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikasi cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB).
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan.
9. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas mengelola kelautan, sumberdaya ikan dan wilayah pesisir. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelautan dan pesisir.
3. Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut.
4. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir.
5. Pengelolaan wilayah pesisir dan fasilitasi pengembangan masyarakat pesisir.
6. Pengembangan teknologi kelautan.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kelautan dan Pesisir.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha, pengolahan, pemasaran dan pengembangan kelembagaan perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja.
2. Penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis bina usaha.

3. Pembinaan usaha, prizinan, dan permodalan perikanan.
4. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
5. Fasilitasi pengembangan kapasitas, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina Usaha.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina Usaha.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pergub DIY Nomer 93 Tahun 2015 dibentuk di 2 UPT (Unit Pelaksana Teknis) yaitu Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya dan Pelabuhan Perikanan Panyai Sadeng. UPT (Unit Pelaksana Teknis) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau tugas teknis operasional. UPT BPTPB (Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya) berkedudukan di cangkringan, Sleman, sedangkan UPT PPP (Pelabuhan Perikanan Panta) Sadeng berkedudukan di Sadeng, Girisubo, Gunungkidul.

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau, air laut dan kesehatan ikan. Untuk melaksanakan tugasnya Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya.
2. Pelaksanaan pengembangan, dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut.
3. Pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau, dan air laut.
4. Pelaksanaan pengelolaan induk ikan.
5. Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan.
6. Pelaksanaan ketatausahaan.
7. Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan.
8. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, pemanfaatn sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai fungsi.

1. Penyusunan program kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.

3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan.
4. Tim pelaksana kampanye GEMARIKAN
Pelaksanaan kampanye GEMARIKAN yang diadakan oleh DKP DIY, dilaksanakan oleh seksi Pengolah Pemasaran DKP DIY. Seksi Pengolah Pemasaran di beri tanggung jawab untuk melaksanakan kampanye GEMARIKAN yang telah menjadi program dari DKP DIY sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Yogyakarta

Adapun tim pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pengolah Pemasaran
Ir. Endang Supraptiningsih
- b. Staff
 1. Sumardiono
 2. Latief

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan, adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama (Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan).

- a. Strategi
 1. Pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan kawasan kelautan dan perikanan.
 2. Penguatan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Iptek dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Kebijakan
 1. Pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi berbasis kawasan.
 2. Optimalisasi produksi dan produktivitas nelayan, sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan.
 3. Percepatan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pemberdayaan potensi ekonomi kawasan pantai selatan.
 4. Pengembangan budaya maritim dan penyiapan Sumber Daya Manusia kelautan yang berkualitas.
2. Strategi, Arah Kebijakan, Misi Kedua (Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan).
 - a. Strategi
 1. Pengembangan ketersediaan ikan, distribusi, akses, mutu keamanan pangan dan peningkatan usaha serta investasi.

- b. Kebijakan
 - 1. Fasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan dan pengembangan budaya makan ikan.
- 3. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Ketiga (Meningkatkan dan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan perikanan).
 - a. Strategi
 - 1. Percepatan rehabilitasi ekosistem dan cadangan SDA.
 - 2. Menciptakan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait.
 - b. Kebijakan
 - 1. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya kelautan perikanan.